





MIMBAR ALAT KELENGKAPAN DEWAN

DPRD KOTA YOGYAKARTA

BADAN KEHORMATAN
PENGAWAL MARWAH LEMBAGA DEWAN

Kedepankan Deteksi Dini, Tak Temukan Pelanggaran

YOGYA (KR) - Sebagai salah satu pilar penyelenggara pemerintahan, lembaga dewan dituntut mampu menjalankan fungsi dan wewenangnya dengan baik. Termasuk di dalamnya menjaga kredibilitas hingga moral para anggotanya yang merupakan representasi wakil rakyat. Keberadaan Badan Kehormatan sangat dibutuhkan dalam mengawal marwah lembaga dewan tersebut.

Badan Kehormatan merupakan salah satu alat perlengkapan dewan yang bersifat tetap. Di Kota Yogyakarta, Badan Kehormatan lebih mengedepankan deteksi dini sehingga sepanjang tahun ini tidak ditemukan adanya pelanggaran etik maupun tata tertib. Sehingga dari total 40 anggota dewan di DPRD Kota







Bambang Anjar Jalumurti Yogyakarta, tidak ada satu pun yang mendapatkan sanksi.

Merujuk tata tertib DPRD Kota Yogyakarta terdapat lima anggota Badan Kehormatan. Dua anggota merangkap sebagai pimpinan yakni Bambang Anjar Jalumurti sebagai ketua dan Indaruwanto Eko Cahyono sebagai wakil ketua. Sedangkan tiga anggota lainnya ialah Choliq Nugroho Adji, Endro Sulaksana dan R Krisma Eka Putra. Seluruh anggota Badan Kehormatan tersebut merupakan wakil dari masing-masing fraksi yang ada di DPRD Kota Yogyakarta.

Bambang membenarkan fungsi utama Badan Kehormatan adalah memastikan dan mengawal martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas dewan baik lembaga maupun anggota di dalamnya. Sedangkan dalam menjalankan tugasnya, Badan Kehormatan menjalankan dua fungsi. Yakni fungsi pasif yaitu menerima pengaduan dan laporan-laporan dari masyarakat terkait kinerja atau pelanggaran-pelanggaran terhadap tata tertib dan kode etik dewan. Kemudian fungsi aktif bersikap aktif dalam memantau dan mendorong kepatuhan setiap anggota terhadap moral dan kinerja dewan. "Minimal setiap bulan kita selalu menggelar rapat, satu hingga dua kali.

Ditambah rapat insidental dalam pembahasan-pembahasan khusus," jelasnya.

Diakui, deteksi dini terhadap pelanggaran anggota lebih dikedepankan oleh Badan Kehormatan. Hal ini supaya bisa dilakukan pencegahan melalui upaya persuasif oleh anggota Badan Kehormatan yang merupakan representasi tiap fraksi. Dengan begitu ketika ada potensi pelanggaran baik yang menyangkut tata tertib maupun etika, anggota Badan Kehormatan secara aktif akan melakukan pencegahan. "Misal ada potensi pelanggaran oleh anggota fraksi tertentu, maka anggota Badan Kehormatan dari fraksi tersebut yang akan mengingatkan agar jangan sampai terjadi pelanggaran. Pola seperti ini akan lebih efektif untuk saling mengingatkan. Kami bersyukur, sejauh ini belum ada temuan pelanggaran," urai Bambang.

Di samping itu Badan Kehormatan juga menyelenggarakan kegiatan untuk memastikan anggota dewan mampu memahami tugasnya sesuai tata tertib dan kode etik yang telah dibuat. Di antaranya seperti membagikan bahan sosialisasi ke seluruh anggota dewan. Kinerja yang tidak kalah penting ialah menyusun telaah terkait penyempurnaan tata tertib dan tata beracara serta inventarisir potensi-potensi pelanggaran. Dari proses tersebut maka deteksi dini terhadap potensi pelanggaran bisa diantisipasi.

Kendati kinerja anggota dewan harus terbagi dengan menyerap aspirasi konstituen, namun kedisiplinan dalam mengikuti agenda rapat di gedung dewan juga menjadi kewajiban. Untuk itu Badan Kehormatan rutin memonitor kedisiplinan para anggota dewan tersebut. Terutama dengan mengamati daftar hadir setiap agenda rapat baik sidang paripurna, rapat panitia khu-

sangkutan. Terdapat lima unsur sanksi yang dapat diberikan oleh Badan Kehormatan yakni nilai teguran lisan, teguran tertulis, mengusulkan pemberhentian sebagai pimpinan alat perlengkapan, mengusulkan pemberhentian sementara sebagai anggota dewan, dan atau mengusulkan pemberhentian sebagai anggota dewan sesuai ketentuan peraturan perundangan. Akan tetapi lantaran tidak ditemukan pelanggaran dalam satu tahun ini, maka belum ada jenis sanksi yang dijatuhkan oleh Badan Kehormatan.

Kendati belum menemukan bentuk pelanggaran, namun Badan Kehormatan juga melakukan studi komparasi di daerah lain yang mampu menyelesaikan kasus dengan baik. Hal ini agar memiliki pembandingan dalam upaya mengantisipasi penanganan kasus yang mungkin bisa terjadi.

(Dhi)-f



KR-Isimewa
Studi komparasi Badan Kehormatan DPRD Kota Yogyakarta untuk penanganan pelanggaran.



KR-Isimewa
Rapat koordinasi untuk deteksi dini pelanggaran.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 21 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005